

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dan Deskripsi UKM

1. Sejarah Umum Kecamatan Seberang Ulu I

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang berada diatas kelurahan. Kecamatan Seberang Ulu I terbagi lima Kelurahan yakni, Kelurahan 1 Ulu, Kelurahan 2 Ulu, Kelurahan 3-4 Ulu, Kelurahan 5 Ulu, Kelurahan 7 Ulu. Kecamatan Seberang Ulu I sudah terbentuk sejak tahun 1980-an. Kecamatan Seberang Ulu I memiliki luas wilayah $\pm 9,95 \text{ Km}^2$ ¹. Adapun Visi dan Misi Kecamatan Seberang Ulu I :

a. Visi

Mewujudkan Palembang Emas Darussalam tahun 2023.

b. Misi

- 1) Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional.
- 2) Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi.

2. Kondisi Geografis Kecamatan Seberang Ulu I

a. Letak wilayah

Berdasarkan letak geografis wilayah, Kecamatan Seberang Ulu I letaknya sangat strategis, dengan batas-batas sebagai berikut :

¹ Renstra Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, *Data monografi Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang*, hlm. 12

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kecil dan Kecamatan Ilir Barat II.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jakabaring dan Kecamatan Kertapati.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Ilir Barat II.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jakabaring.

b. Luas Wilayah

Secara topografi, Kecamatan Seberang Ulu I mempunyai luas wilayah seluas ± 9,95 Km², yang terdiri dari :

- 1) Tanah bersertifikat : 9,95 Km²
- 2) Tanah belum bersertifikat : -

Secara administratif wilayah Kecamatan Seberang Ulu I terdiri dari 180 RT dan 85 RW²

3. Demografi Kecamatan Seberang Ulu I

a. Kependudukan

- 1) Jumlah Kepala Keluarga
Jumlah : 17.576
- 2) Jumlah penduduk / Jiwa

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk Jiwa Tahun 2020
1	Laki-laki	43.290
2	Perempuan	44.593
TOTAL		87.883

(sumber : Data monografi Kecamatan Seberang Ulu I Tahun 2020)

² *Ibid., hlm. 15*

b. Kewarganegaraan

- 1) WNA : 0
- 2) WNI : 87.883
- Jumlah : 87.883

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ISLAM	14.49 1	51.645	67.236
2	KRISTEN	3.450	5.471	8.921
3	KATHOLI K	3.110	4.479	7.589
4	BUDHA	979	1.564	2.543
5	HINDU	843	751	1.594
	JUMLAH	21.89 4	65.029	87.883

1. Keadaan Ekonomi Kecamatan Seberang Ulu I

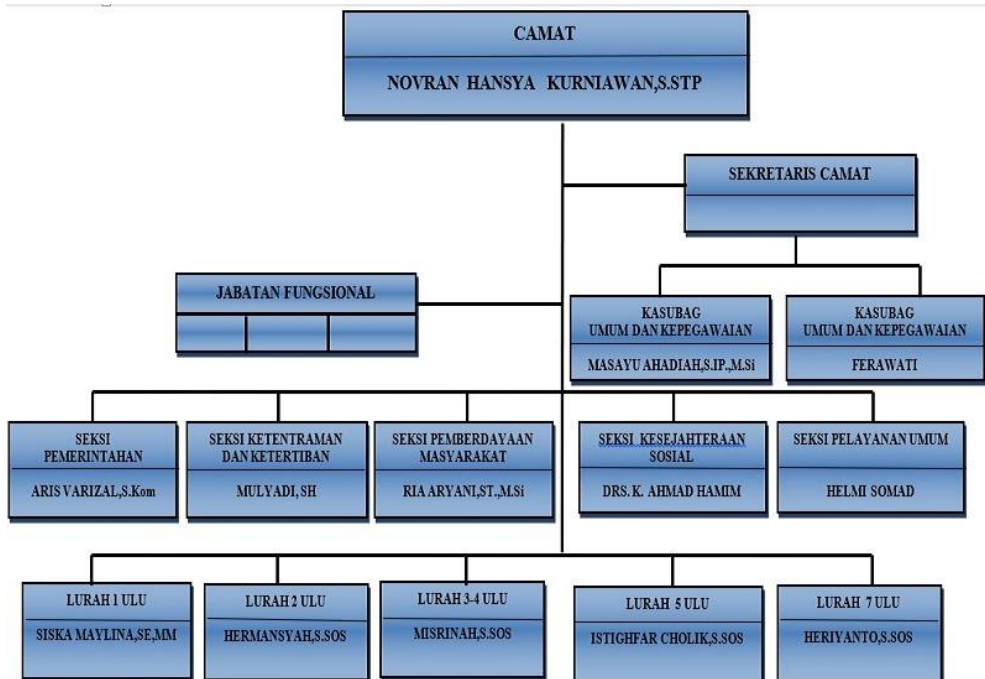
Secara umum kondisi perekonomian masyarakat Kecamatan Seberang Ulu I di topang oleh Pasar-pasar Tradisional yang ada di wilayah Kecamatan Seberang Ulu I seperti Pasar Tradisional 2 Ulu, Pasar Tradisional 3-4 Ulu dan Pasar Tradisional 7 Ulu. Beberapa mata pencaharian masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti : PNS, POLRI, TNI,

BUMN, Wiraswasta, Paramedis/Dokter, Buruh, Guru, Pedagang, Dosen, Pensiunan dan Pegawai Swasta.

5. Struktur Pemerintahan Kecamatan Seberang Ulu I

Gambar 4.1

Struktur Pemerintahan Kecamatan Seberang Ulu I



6. Sejarah, Visi dan Misi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Palembang

a. Sejarah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gagasan mengenai suatu pembentukan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sudah dilakukan sejak tahun 1970-an di Pulau Jawa. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki suatu peranan yang sangat besar

bagi perekonomian Indonesia. Hal tersebut terbukti nyata pada saat Negara Indonesia sedang mengalami krisis moneter pada tahun 1997, pada saat itu perusahaan-perusahaan besar gulung tikar atau bangkrut, justru UKM tidak goyah sedikit pun akan tetapi UKM justru menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia pada saat itu. Sejak saat itulah UKM dinyatakan dapat membantu kestabilan perekonomian masyarakat Indonesia³.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki salah satu peranan penting dan strategis dalam membantu pembangunan ekonomi nasional. Selain memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi dan juga penyerapan tenaga kerja, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga memiliki peranan dalam mendistribusikan hasil-hasil dari pembangunan. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pun telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis moneter seperti yang telah terjadi. Ketika krisis moneter menerpa pada periode itu menerpa pada tahun 1997-1998, semua perusahaan bahkan instansi-instansi lain banyak yang mengalami kerugian bahkan sampai ada yang terpaksa ditutup karena dampak dari krisis moneter. Akan tetapi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tetap bertahan ditengah terpaan krisis moneter yang terjadi pada saat itu.

Pasca krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998 di Indonesia, jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada saat itu tidak ada yang berkurang, bahkan terus menerus meningkat jumlah UKM yang ada pada saat itu. Bahkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 85

³ Data Monografi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Palembang, *Deskripsi Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Palembang*, hlm. 2

hingga 107 juta jiwa tenaga kerja, hal tersebut semakin bertambah hingga tahun 2012. Dan terus meningkat jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada sampai saat ini.

b. Visi dan Misi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

1) Visi

Mewujudkan Sumatera Selatan Maju Untuk Semua

2) Misi

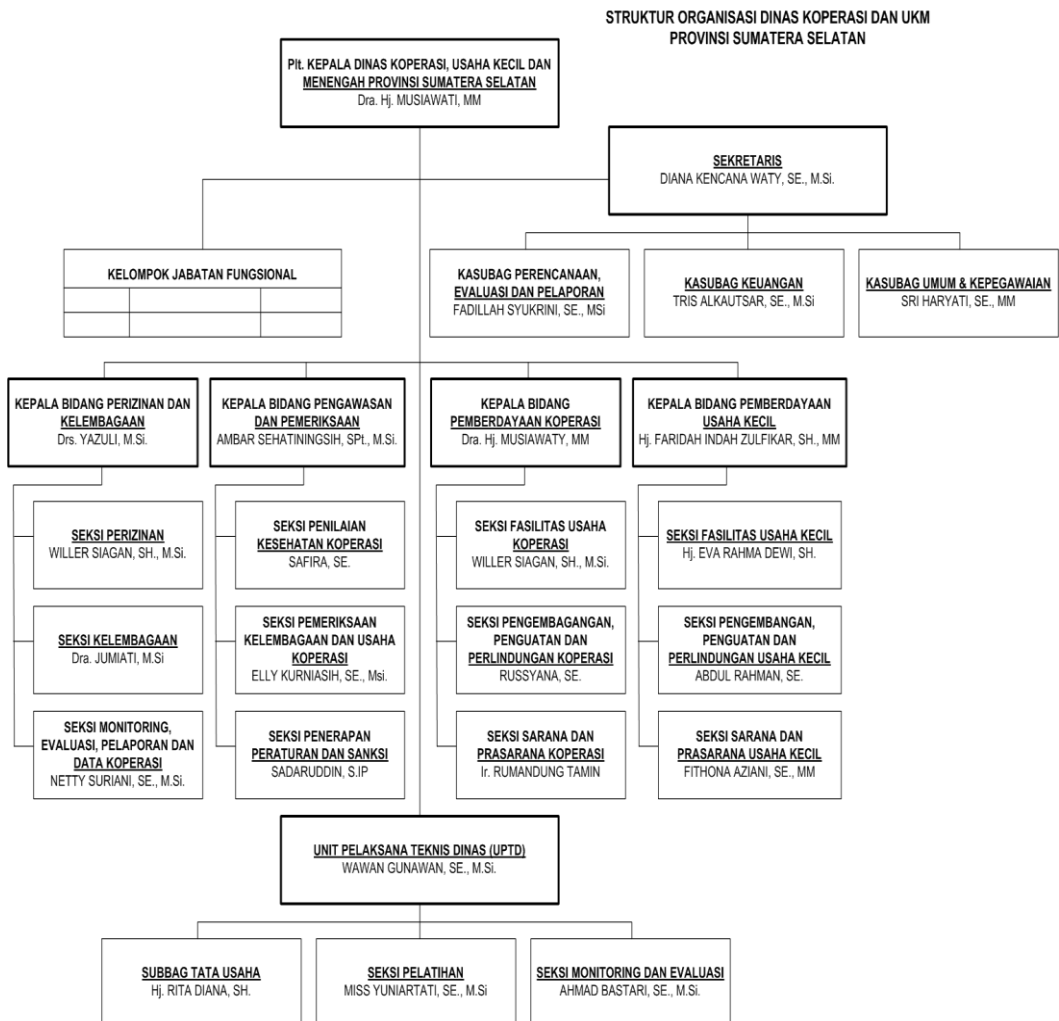
- a) Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri dan UKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan
- b) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan yang sehat, berpendidikan, professional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas.
- c) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif.
- d) Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
- e) Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan

berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

7. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Palembang

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Palembang Tahun 2021



8. Tujuan dan Fungsi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Palembang

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan suatu usaha yang bertujuan menjaga kestabilan perekonomian masyarakat, dengan adanya UKM dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada, pemerataan pendapatan masyarakat. Membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Fungsi dari keberadaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ialah sebagai wadah penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan bisa memiliki pekerjaan dengan cara melamar pekerjaan di masing-masing unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sesuai dengan skill dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Hal tersebut sangat berperan cukup penting dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Serta sebagai salah satu solusi bagi masyarakat ekonomi menengah karena hal tersebut dapat membantu perkembangan perekonomian suatu Negara dikarenakan terciptanya suatu inovasi baru dalam segi produksi.

B. Hasil Penelitian

1. Hasil wawancara

Profil Narasumber

Nama UKM : CV. PRABU JAYA ABADI

Nama : Adinda Amelia

Jabatan : Bendahara

Alamat UKM : Jl. Aiptu Wahab No. 397 RT. 008 RW. 002

Tabel 4.3 Hasil Wawancara Dengan Narasumber I

NO	VARIABEL	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Partisipasi	<p>1. Pelatihan apa saja yang telah diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kepada pemilik UKM agar usaha mereka dapat berkembang dengan baik ?</p> <p>2. Apakah terdapat pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terkait dengan <i>community development</i> ?</p> <p>3. Apakah anggota UKM ikut serta dalam menjalankan peraturan-peraturan yang mengandung unsur <i>community development</i> dalam suatu kegiatan usaha yang dilakukan ?</p>	<p>Banyak pelatihan yang sudah diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), salah satunya yaitu tentang kewirausahaan dan pelatihan tentang <i>community development</i> dalam berusaha.</p> <p>Ada, yaitu pernah diberikan pelatihan mengenai <i>community development</i> dalam pelaksanaan suatu usaha.</p> <p>Sejauh ini sudah melaksanakan peraturan yang sesuai dengan unsur <i>community development</i>.</p>

		<p>4. Apakah anggota UKM ikut serta dalam perencanaan jangka panjang terhadap perkembangan suatu Usaha ?</p> <p>5. Apakah rencana yang dibuat oleh pelaku UKM mengandung unsur <i>community development</i> ?</p> <p>6. Apakah pemilik UKM terjun langsung dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan UKM ?</p> <p>7. Apakah dengan diterapkannya prinsip-prinsip <i>community development</i> lebih memudahkan pelaku UKM dalam mencapai tujuan dari suatu usaha tersebut ?</p>	<p>Perencanaan jangka panjang hanya sering dilakukan oleh atasan dan staff saja.</p> <p>Karena kami sudah mendapat pelatihannya, jadi rencana yang kami buat juga mengandung hal tersebut.</p> <p>3 hari sekali pemilik UKM mengawasi jalannya usaha.</p> <p>Sejauh ini dengan menerapkan prinsip tersebut, tujuan yang kami buat satu-persatu tercapai.</p>
--	--	--	--

2.	Kesetaraan dan Keadilan Gender	<p>1. Apakah laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan berpendapat yang sama dalam menerapkan prinsip-prinsip <i>community development</i> ?</p> <p>2. Apakah perempuan berhak memegang jabatan yang strategis dalam suatu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ?</p> <p>3. Apakah <i>reward</i> dan <i>punishment</i> diberlakukan oleh pelaku UKM terhadap seluruh anggota UKM bukan hanya untuk laki-laki tetapi juga diberlakukan untuk perempuan sesuai dengan point <i>community development</i> ?</p>	<p>Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kebebasan berpendapat.</p> <p>Tentunya, siapa saja berhak memegang jabatan penting di Usaha ini, asalkan sesuai dengan syarat yang diberikan.</p> <p><i>Reward</i> dan <i>punishment</i> menjadi point penting karena dapat membantu meningkatkan kualitas kinerja karyawan.</p>
----	--------------------------------	---	--

3.	Demokratis	<p>1. Apakah terdapat hak yang sama terhadap pemilik UKM dan anggotanya dalam pengambilan keputusan terkait proses penerapan prinsip-prinsip <i>community development</i> ?</p> <p>2. Apakah terdapat pertemuan rutin atau forum diskusi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam penerapan prinsip-prinsip <i>community development</i> terhadap para pelaku Usaha ?</p> <p>3. Apakah pimpinan dalam suatu UKM mudah untuk menerima masukan dari bawahan dalam pelaksanaan kegiatan UKM ?</p> <p>4. Apakah anggota Usaha di ikut sertakan dalam pertemuan rutin atau</p>	<p>Pengambilan keputusan tetap pada pemilik UKM, jika memang mendesak wakil yang turun langsung.</p> <p>Ada, setiap 3-6 bulan sekali, terkadang dilaksanakan di kecamatan kadang juga di kelurahan.</p> <p>Saran sangat kami butuhkan dalam perkembangan usaha.</p> <p>Kadang ikut, tapi lebih sering atasan dan staff saja.</p>
----	------------	---	--

		rapat pimpinan suatu UKM ?	
4.	Transparansi dan Akuntabel	<p>1. Apakah pelaku UKM memberikan akses informasi yang cepat terhadap suatu usaha yang sedang dijalankannya kepada konsumen ?</p> <p>2. Apakah informasi yang diberikan oleh pelaku UKM mengenai suatu usaha mengandung unsur <i>community development</i> ?</p> <p>3. Apakah penguasaan terhadap teknologi menjadi point penting dalam perkembangan suatu UKM ?</p> <p>4. Apakah kurangnya kecakapan dalam berteknologi menjadi penghambat laju perkembangan dalam suatu Usaha ?</p>	<p>Untuk akses informasi bisa di akses secara langsung melalui sosial media kami, atau bisa tanyakan kepada karyawan.</p> <p>Iya, salah satunya ialah keterbukaan dalam pelaksanaan Usaha.</p> <p>Penguasaan saja tidak cukup jika tidak dterapkan, tapi itu merupakan salah satu point penting dalam kemajuan Usaha.</p> <p>Penghambat perkembangan tidak terlalu, karena tidak melalui <i>online</i> saja tapi <i>offline</i> juga.</p>

		<p>5. Adakah solusi yang diberikan oleh pemilik UKM terhadap anggotanya dalam mengatasi kurangnya kecakapan dalam berteknologi ?</p> <p>6. Apakah solusi yang diberikan oleh pelaku UKM tersebut mengandung unsur <i>community development</i> ?</p> <p>7. Apakah dalam UKM ini, pemilik UKM sudah melakukan pembinaan yang mengandung unsur <i>community development</i> mengenai kecakapan berteknologi terhadap anggotanya ?</p> <p>8. Adakah sanksi yang diberikan kepada anggota UKM ketika mereka kurang</p>	<p>Pelatihan seperti pemasaran menggunakan kecanggihan teknologi.</p> <p>Pastinya, Karena solusi dari yang mengandung unsur <i>community development</i> cukup membantu.</p> <p>Sudah diberikan pemahaman mengenai hal tersebut.</p> <p>Surat peringatan (SP) yang kami berikan.</p>
--	--	--	--

		cakap dalam menggunakan kemajuan teknologi ?	
5.	Berkelanjutan	<p>1. Apakah dalam pengambilan suatu keputusan dalam pelaksanaan suatu usaha harus mempertimbangkan kepentingan dari peningkatan suatu kesejahteraan pelaku UKM dan anggotanya ?</p> <p>2. Apakah dalam pengambilan keputusan tersebut membahas tentang suatu inovasi yang akan dilakukan di masa sekarang ?</p> <p>3. Apakah inovasi menjadi salah satu point yang paling terpenting dalam kemajuan perkembangan UKM ?</p>	<p>Harus, karena peningkatan kesejahteraan karyawan merupakan salah satu tujuan penting dalam usaha kami.</p> <p>Setiap rapat selalu membahas mengenai inovasi apa yang akan dilakukan selanjutnya, tepatnya di masa sekarang yang sedang dijalani.</p> <p>Tergantung dengan inovasi yang dilakukan seperti apa.</p>

		<p>4. Adakah inovasi yang dilakukan dalam UKM ini ?</p> <p>5. Apakah terdapat hambatan yang dialami oleh pemilik UKM dalam melakukan inovasi suatu UKM ?</p> <p>6. Apakah dengan diterapkannya prinsip-prinsip <i>community development</i> memudahkan pelaku UKM dalam pelaksanaan UKM ?</p> <p>7. Adakah inovasi jangka panjang yang dibuat oleh pelaku UKM terhadap kemajuan suatu usahanya baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang ?</p> <p>8. Apakah setelah diterapkannya prinsip-prinsip <i>community</i></p>	<p>Ada.</p> <p>Hambatan pasti ada, tapi itu bukan menjadi permasalahan yang besar, Karena kami selalu menyiapkan solusi atas hal itu.</p> <p>Cukup membantu karena tujuan kami satu persatu tercapai.</p> <p>Inovasi jangka panjang ada, menjadi penunjang usaha.</p> <p>Sejauh ini cukup memberikan efek yang begitu positif bagi usaha kami.</p>
--	--	--	--

		<p><i>development</i> dalam suatu usaha memberikan perkembangan yang positif terhadap kemajuan suatu UKM ?</p>	
		<p>9. Apakah terdapat kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip <i>community development</i> dalam kegiatan pelaksanaan UKM ?</p>	<p>Kendala pasti ada.</p>
		<p>10. Apakah terdapat perbedaan dalam laju perkembangan UKM sebelum di terapkannya prinsip-prinsip <i>community development</i> dengan telah diterapkannya prinsip-prinsip <i>community development</i> ?</p>	<p>Perbedaannya jelas sangat terasa, sekarang lebih mudah untuk mencapai tujuan usaha.</p>

(Sumber : Hasil Wawancara Pada Tanggal 7 Juli 2021)

Profil Narasumber

Nama UKM : CV. CHOBAN PRATAMA

Nama : Adriani Silviawati

Jabatan : Pemilik

Alamat UKM : Jl. KH Azhari Lr. Tembok No. 1116 RT. 008 RW. 009
Kelurahan 3-4 Ulu

Tabel 4.4 Hasil Wawancara Dengan Narasumber II

NO	VARIABEL	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Partisipasi	<p>1. Pelatihan apa saja yang telah diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kepada pemilik UKM agar usaha mereka dapat berkembang dengan baik ?</p> <p>2. Apakah terdapat pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terkait dengan <i>community development</i> ?</p> <p>3. Apakah anggota UKM ikut serta</p>	<p>Pelatihan tentang pengembangan kreatifitas pelaku usaha, pelatihan mengenai pemasaran yang tepat guna.</p> <p>Sudah pernah dilakukan pelatihan tentang itu tapi kami belum menerapkannya.</p> <p>Dalam menjalankan peraturan pastinya selalu ikut serta dalam</p>

		<p>dalam menjalankan peraturan-peraturan yang mengandung unsur <i>community development</i> dalam suatu kegiatan usaha yang dilakukan ?</p>	<p>mematuhi peraturan, tetapi peraturan yang bersifat umum.</p>
		<p>4. Apakah anggota UKM ikut serta dalam perencanaan jangka panjang terhadap perkembangan suatu Usaha ?</p>	<p>Untuk perencanaan jangka panjang hanya staff dan atasan saja yang melakukannya.</p>
		<p>5. Apakah rencana yang dibuat oleh pelaku UKM mengandung unsur <i>community development</i> ?</p>	<p>Rencana bersifat umum.</p>
		<p>6. Apakah pemilik UKM terjun langsung dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan UKM ?</p>	<p>1 sampai 3 kali dalam satu minggu.</p>
		<p>7. Apakah dengan diterapkannya</p>	<p>Tidak tahu, karena kami belum menerapkan prinsip-prinsip itu.</p>

		<p>prinsip-prinsip <i>community development</i> lebih memudahkan pelaku UKM dalam mencapai tujuan dari suatu usaha tersebut ?</p>	
2.	Kesetaraan dan Keadilan Gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan berpendapat yang sama dalam menerapkan prinsip-prinsip <i>community development</i> ? 2. Apakah perempuan berhak memegang jabatan yang strategis dalam suatu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ? 3. Apakah <i>reward</i> dan <i>punishment</i> diberlakukan oleh pelaku UKM terhadap seluruh 	<p>Kebebasan berpendapat semuanya mempunyai hak yang sama, laki-laki ataupun perempuan.</p> <p>Tentu, tapi jika orang tersebut memenuhi syarat dan kriteria yang diberikan.</p> <p><i>Reward</i> dan <i>punishment</i> berlaku untuk semua karyawan guna untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja kerja.</p>

		<p>anggota UKM bukan hanya untuk laki-laki tetapi juga diberlakukan untuk perempuan sesuai dengan point <i>community development</i> ?</p>	
3.	Demokratis	<p>1. Apakah terdapat hak yang sama terhadap pemilik UKM dan anggotanya dalam pengambilan keputusan terkait proses penerapan prinsip-prinsip <i>community development</i> ?</p> <p>2. Apakah terdapat pertemuan rutin atau forum diskusi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam penerapan prinsip-prinsip <i>community development</i> terhadap para pelaku Usaha ?</p> <p>3. Apakah pimpinan dalam suatu UKM mudah untuk</p>	<p>Pengambilan keputusan tetap pada pemilik UKM, staff dan karyawan hanya memiliki hak untuk memberikan saran dan masukan.</p> <p>Ada, sekitar 3-6 bulan sekali di Kelurahan masing-masing, tapi jika keadaan sedang pandemi seperti ini belum dilakukan.</p> <p>Saran dan masukan sangat kami terima.</p>

		<p>menerima masukan dari bawahan dalam pelaksanaan kegiatan UKM ?</p> <p>4. Apakah anggota Usaha di ikut sertakan dalam pertemuan rutin atau rapat pimpinan suatu UKM ?</p>	<p>Tentu, 1 bulan bahkan satu kali.</p>
4.	<p>Transparansi dan Akuntabel</p>	<p>1. Apakah pelaku UKM memberikan akses informasi yang cepat terhadap suatu usaha yang sedang dijalkannya kepada konsumen ?</p> <p>2. Apakah informasi yang diberikan oleh pelaku UKM mengenai suatu usaha mengandung unsur <i>community development</i> ?</p> <p>3. Apakah penguasaan terhadap teknologi menjadi point penting dalam perkembangan suatu UKM ?</p>	<p>Akses informasi dapat ditanyakan kepada karyawan atau melalui sosial media.</p> <p>Tidak, hanya bersifat umum.</p> <p>Untuk masa pandemi saat ini hal itu dibutuhkan.</p>

		<p>4. Apakah kurangnya kecakapan dalam berteknologi menjadi penghambat laju perkembangan dalam suatu Usaha ?</p> <p>5. Adakah solusi yang diberikan oleh pemilik UKM terhadap anggotanya dalam mengatasi kurangnya kecakapan dalam berteknologi ?</p> <p>6. Apakah solusi yang diberikan oleh pelaku UKM tersebut mengandung unsur <i>community development</i> ?</p> <p>7. Apakah dalam UKM ini, pemilik UKM sudah melakukan pembinaan yang mengandung unsur</p>	<p>Belum tentu, karena masih banyak jalan dan cara lain untuk mengembangkan UKM.</p> <p>Ada.</p> <p>Pelatihan serta pemahaman kepada mereka yang kurang memahami.</p> <p>Belum.</p>
--	--	---	---

		<p><i>community development</i> mengenai kecakapan berteknologi terhadap anggotanya ?</p> <p>8. Adakah sanksi yang diberikan kepada anggota UKM ketika mereka kurang cakap dalam menggunakan kemajuan teknologi ?</p>	<p>Sejauh ini, belum ada karena semuanya masih stabil.</p>
5.	Berkelanjutan	<p>1. Apakah dalam pengambilan suatu keputusan dalam pelaksanaan suatu usaha harus mempertimbangkan kepentingan dari peningkatan suatu kesejahteraan pelaku UKM dan anggotanya ?</p> <p>2. Apakah dalam pengambilan keputusan tersebut membahas tentang suatu inovasi yang</p>	<p>Iya harus, karena kesejahteraan karyawan merupakan salah satu kemajuan dari suatu usaha.</p> <p>Hanya kadang-kadang saja, tidak terlalu sering.</p>

	<p>akan dilakukan di masa sekarang ?</p> <p>3. Apakah inovasi menjadi salah satu point yang paling terpenting dalam kemajuan perkembangan UKM ?</p> <p>4. Adakah inovasi yang dilakukan dalam UKM ini ?</p> <p>5. Apakah terdapat hambatan yang dialami oleh pemilik UKM dalam melakukan inovasi suatu UKM ?</p> <p>6. Apakah dengan diterapkannya prinsip-prinsip <i>community development</i> memudahkan pelaku UKM dalam pelaksanaan UKM ?</p> <p>7. Adakah inovasi jangka panjang</p>	<p>Bisa jadi, tapi tergantung dengan inovasi yang diberikan seperti apa.</p> <p>Ada.</p> <p>Tidak tahu.</p> <p>Tentu saja ada, untuk persiapan kedepan selanjutnya.</p> <p>Tidak tahu.</p>
--	---	--

	<p>yang dibuat oleh pelaku UKM terhadap kemajuan suatu usahanya baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang ?</p>	
	<p>8. Apakah setelah diterapkannya prinsip-prinsip <i>community development</i> dalam suatu usaha memberikan perkembangan yang positif terhadap kemajuan suatu UKM ?</p>	<p>Tidak tahu karena belum pernah sama sekali menerapkan hal itu.</p>
	<p>9. Apakah terdapat kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip <i>community development</i> dalam kegiatan pelaksanaan UKM ?</p>	<p>Tidak tahu karena belum melakukannya.</p>
	<p>10. Apakah terdapat perbedaan dalam laju perkembangan</p>	<p>Tidak tahu.</p>

		<p>UKM sebelum di terapkannya prinsip-prinsip <i>community development</i> dengan telah diterapkannya prinsip-prinsip <i>community development</i> ?</p>	
--	--	--	--

(Sumber : Hasil Wawancara Pada Tanggal 10 Juli 2021)

Profil Narasumber

Nama UKM : CV. LESTARI

Nama : Fatimah

Jabatan : Pemilik

Alamat UKM : Jl. KH Azhari RT. 003 RW. 001 Kelurahan 5 Ulu

Tabel 4.5 Hasil Wawancara Dengan Narasumber III

NO	VARIABEL	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Partisipasi	<p>1. Pelatihan apa saja yang telah diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kepada pemilik UKM agar usaha mereka dapat berkembang dengan baik ?</p> <p>2. Apakah terdapat pelatihan yang</p>	<p>Belum pernah menerima pelatihan dari Dinas Koperasi dan UKM agar usaha dapat berkembang dengan baik dikarenakan kami kurang <i>update</i> tentang informasi –informasi pelatihan.</p> <p>Kami belum pernah mengikuti pelatihan yang ada jadi untuk</p>

		<p>diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terkait dengan <i>community development</i> ?</p> <p>3. Apakah anggota UKM ikut serta dalam menjalankan peraturan-peraturan yang mengandung unsur <i>community development</i> dalam suatu kegiatan usaha yang dilakukan ?</p> <p>4. Apakah anggota UKM ikut serta dalam perencanaan jangka panjang terhadap perkembangan suatu Usaha ?</p> <p>5. Apakah rencana yang dibuat oleh pelaku UKM mengandung unsur <i>community development</i> ?</p>	<p>mengetahui tentang pelatihan terkait <i>community development</i> kami juga belum menerima pelatihannya.</p> <p>Tidak semua karyawan mengetahui tentang <i>community development</i> jadi kami belum dapat menjalankan unsur-unsur yang mengandung hal itu dalam usaha kami, kami baru memulai untuk mensosialisasikan tentang hal itu.</p> <p>Hanya sebagian dari karyawan yang ikut serta.</p> <p>hanya rencana yang bersifat umum.</p>
--	--	--	--

		<p>6. Apakah pemilik UKM terjun langsung dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan UKM ?</p> <p>7. Apakah dengan diterapkannya prinsip-prinsip <i>community development</i> lebih memudahkan pelaku UKM dalam mencapai tujuan dari suatu usaha tersebut ?</p>	<p>Pemilik UKM terjun langsung mengawasi kegiatan yang dilaksanakan. Setiap hari mengawasi jalannya usaha.</p> <p>Dengan prinsip <i>community development</i> mungkin dapat membantu kami mencapai tujuan suatu usaha, tapi kami masih perlu banyak edukasi lagi ke setiap karyawan.</p>
2.	Kesetaraan dan Keadilan Gender	<p>1. Apakah laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan berpendapat yang sama dalam menerapkan prinsip-prinsip <i>community development</i> ?</p> <p>2. Apakah perempuan berhak memegang jabatan yang strategis</p>	<p>Laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan berpendapat yang sama.</p> <p>Berhak jika memenuhi kriteria dan mampu dibidang tersebut.</p>

		<p>dalam suatu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ?</p> <p>3. Apakah <i>reward</i> dan <i>punishment</i> diberlakukan oleh pelaku UKM terhadap seluruh anggota UKM bukan hanya untuk laki-laki tetapi juga diberlakukan untuk perempuan sesuai dengan point <i>community development</i> ?</p>	<p>Pria dan wanita bisa mendapatkan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang sama.</p>
3.	Demokratis	<p>1. Apakah terdapat hak yang sama terhadap pemilik UKM dan anggotanya dalam pengambilan keputusan terkait proses penerapan prinsip-prinsip <i>community development</i> ?</p>	<p>Pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh pemilik UKM tetapi karyawannya berhak untuk memberikan pendapat dan masukan.</p>

		<p>2. Apakah terdapat pertemuan rutin atau forum diskusi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam penerapan prinsip-prinsip <i>community development</i> terhadap para pelaku Usaha ?</p> <p>3. Apakah pimpinan dalam suatu UKM mudah untuk menerima masukan dari bawahan dalam pelaksanaan kegiatan UKM ?</p> <p>4. Apakah anggota Usaha di ikut sertakan dalam pertemuan rutin atau rapat pimpinan suatu UKM ?</p>	<p>Ada, tapi kami belum rutin mengikutinya.</p> <p>Iya, dikarenakan pimpinan memerlukan itu untuk menjadi acuan dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Hanya pimpinan atau pemilik UKM.</p>
4.	Transparansi dan Akuntabel	1. Apakah pelaku UKM memberikan akses informasi yang cepat terhadap suatu usaha yang sedang dijalankannya kepada konsumen ?	Akses informasi tentang suatu usaha diberikan karyawan secara langsung kepada konsumen.

		<p>2. Apakah informasi yang diberikan oleh pelaku UKM mengenai suatu usaha mengandung unsur <i>community development</i> ?</p> <p>3. Apakah penguasaan terhadap teknologi menjadi point penting dalam perkembangan suatu UKM ?</p> <p>4. Apakah kurangnya kecakapan dalam berteknologi menjadi penghambat laju perkembangan dalam suatu Usaha ?</p> <p>5. Adakah solusi yang diberikan oleh pemilik UKM terhadap anggotanya dalam mengatasi kurangnya kecakapan dalam berteknologi ?</p>	<p>Setiap informasi yang diberikan tidak mengandung unsur itu.</p> <p>Teknologi sangat dibutuhkan dalam perkembangan suatu UKM mengingat kemajuan teknologi yang semakin berkembang dan terus diminati.</p> <p>Ya, suatu usaha yang mengedepankan teknologi tentunya usaha tersebut akan lebih berkembang.</p> <p>Ada, dengan berbagai pelatihan dan edukasi.</p>
--	--	--	---

		<p>6. Apakah solusi yang diberikan oleh pelaku UKM tersebut mengandung unsur <i>community development</i> ?</p> <p>7. Apakah dalam UKM ini, pemilik UKM sudah melakukan pembinaan yang mengandung unsur <i>community development</i> mengenai kecakapan berteknologi terhadap anggotanya ?</p> <p>8. Adakah sanksi yang diberikan kepada anggota UKM ketika mereka kurang cakap dalam menggunakan kemajuan teknologi ?</p>	<p>Solusi yang diberikan berupa pelatihan dan edukasi hal tersebut berbentuk umum.</p> <p>Belum melakukan pembinaan.</p> <p>Sejauh ini belum ada sanksi.</p>
5.	Berkelanjutan	<p>1. Apakah dalam pengambilan suatu keputusan dalam pelaksanaan suatu</p>	<p>Ya, karena keajahteraan karyawan akan mempengaruhi kemajuan usaha.</p>

		<p>usaha harus mempertimbangkan kepentingan dari peningkatan suatu kesejahteraan pelaku UKM dan anggotanya ?</p>	
		<p>2. Apakah dalam pengambilan keputusan tersebut membahas tentang suatu inovasi yang akan dilakukan di masa sekarang ?</p>	<p>Ya, karena kami selalu mengedepankan inovasi yang bisa diberlakukan dimasa sekarang.</p>
		<p>3. Apakah inovasi menjadi salah satu point yang paling terpenting dalam kemajuan perkembangan UKM ?</p>	<p>Tentu karena inovasi dibuat untuk kemajuan UKM.</p>
		<p>4. Adakah inovasi yang dilakukan dalam UKM ini ?</p>	<p>Ada.</p>
		<p>5. Apakah terdapat hambatan yang dialami oleh pemilik UKM dalam melakukan</p>	<p>Tentu saja, setiap melakukan segala sesuatu pasti memiliki hambatan tapi kami selalu menyediakan solusinya.</p>

		<p>inovasi suatu UKM ?</p> <p>6. Apakah dengan diterapkannya prinsip-prinsip <i>community development</i> memudahkan pelaku UKM dalam pelaksanaan UKM ?</p> <p>7. Adakah inovasi jangka panjang yang dibuat oleh pelaku UKM terhadap kemajuan suatu usahanya baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang ?</p> <p>8. Apakah setelah diterapkannya prinsip-prinsip <i>community development</i> dalam suatu usaha memberikan perkembangan yang positif terhadap kemajuan suatu UKM ?</p>	<p>Sejauh ini, usaha kami jalankan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kami harapkan walaupun kami belum menerapkan prinsip-prinsip itu.</p> <p>Inovasi jangka panjang yang akan dilakukan selanjutnya tentunya ada.</p> <p>Belum merasakan manfaatnya.</p>
--	--	---	---

		<p>9. Apakah terdapat kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip <i>community development</i> dalam kegiatan pelaksanaan UKM ?</p>	Tidak tahu.
		<p>10. Apakah terdapat perbedaan dalam laju perkembangan UKM sebelum di terapkannya prinsip-prinsip <i>community development</i> dengan telah diterapkannya prinsip-prinsip <i>community development</i> ?</p>	Tidak tahu, karena kami belum menerapkannya.

(Sumber : Hasil Wawancara Pada Tanggal 12 Juli 2021)

Profil Narasumber

Nama UKM : PT. SARIBUMI SRIGUNA PUTRA

Nama : Julia Andriani

Jabatan : Tax Admin

Alamat UKM : Jl. Jend Ahmad Yani 7 Ulu, Kelurahan 7 Ulu

Tabel 4.6 Hasil Wawancara Dengan Narasumber IV

NO	VARIABEL	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Partisipasi	<p>1. Pelatihan apa saja yang telah diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kepada pemilik UKM agar usaha mereka dapat berkembang dengan baik ?</p> <p>2. Apakah terdapat pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terkait dengan <i>community development</i> ?</p> <p>3. Apakah anggota UKM ikut serta dalam menjalankan peraturan-peraturan yang mengandung unsur <i>community development</i> dalam suatu kegiatan usaha yang dilakukan ?</p>	<p>Banyak pelatihan yang sudah diberikan, salah satunya, yaitu pelatihan tentang kewirausahaan kepada para pelaku UKM untuk mengembangkan usahanya salah satunya yang berbasis <i>community development</i>.</p> <p>Ada, salah satunya yaitu tentang kewirausahaan yang berbasis <i>community development</i>.</p> <p>Ya, semua karyawan selalu mematuhi dan menjalankan peraturan yang ada dalam UKM, salah satunya yaitu peraturan yang mengarah pada <i>community development</i>.</p>

		<p>4. Apakah anggota UKM ikut serta dalam perencanaan jangka panjang terhadap perkembangan suatu Usaha ?</p> <p>5. Apakah rencana yang dibuat oleh pelaku UKM mengandung unsur <i>community development</i> ?</p> <p>6. Apakah pemilik UKM terjun langsung dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan UKM ?</p> <p>7. Apakah dengan diterapkannya prinsip-prinsip <i>community development</i> lebih memudahkan pelaku UKM dalam mencapai tujuan dari</p>	<p>Terdapat jadwal jika untuk melakukan perencanaan jangka panjang, dan karyawan di ikut sertakan dalam perencanaan jangka, tetapi jika tidak memungkinkan tidak di ikut sertakan.</p> <p>Tentu, semua rencana yang dibuat mengandung unsur <i>community development</i>, agar semua tujuan kami dapat mudah tercapai.</p> <p>Setiap hari pemilik UKM selalu datang untuk datang dan mengawasi jalannya usaha.</p> <p>Ya tentunya, karena di hal tersebut dapat memudahkan kami dalam mencapai tujuan kami, beberapa tujuan yang kami buat sejauh ini sudah tercapai dengan baik.</p>
--	--	---	---

		suatu usaha tersebut ?	
2.	Kesetaraan dan Keadilan Gender	<p>1. Apakah laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan berpendapat yang sama dalam menerapkan prinsip-prinsip <i>community development</i> ?</p> <p>2. Apakah perempuan berhak memegang jabatan yang strategis dalam suatu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ?</p> <p>3. Apakah <i>reward</i> dan <i>punishment</i> diberlakukan oleh pelaku UKM terhadap seluruh anggota UKM bukan hanya untuk laki-laki tetapi juga diberlakukan untuk perempuan sesuai dengan point <i>community development</i> ?</p>	<p>Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kebebasan yang sama dalam berpendapat serta memberikan kritikan.</p> <p>Berhak, siapapun berhak mau laki-laki ataupun perempuan, asalkan mereka mampu dan memenuhi syarat yang ada.</p> <p>Hal itu sangat dibutuhkan sebab dapat membuat karyawan semakin giat dan meningkatkan loyalitas kerja mereka.</p>

3.	Demokratis	<p>1. Apakah terdapat hak yang sama terhadap pemilik UKM dan anggotanya dalam pengambilan keputusan terkait proses penerapan prinsip-prinsip <i>community development</i> ?</p> <p>2. Apakah terdapat pertemuan rutin atau forum diskusi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam penerapan prinsip-prinsip <i>community development</i> terhadap para pelaku Usaha ?</p> <p>3. Apakah pimpinan dalam suatu UKM mudah untuk menerima masukan dari bawahan dalam pelaksanaan kegiatan UKM ?</p>	<p>Pengambilan keputusan tetap pada pemilik UKM, yang lain tidak memiliki kewenangan.</p> <p>6 bulan sekali biasanya dilakukan di kelurahan masing-masing.</p> <p>Saran, masukan bahkan kritikan sekali pun selalu diterima dengan tangan terbuka oleh pimpinan, karena hal itu dinilai dapat membantu mengembangkan usaha.</p>
----	------------	--	---

		4. Apakah anggota Usaha di ikut sertakan dalam pertemuan rutin atau rapat pimpinan suatu UKM ?	Hanya pemilik UKM dan staff penting saja.
4.	Transparansi dan Akuntabel	<p>1. Apakah pelaku UKM memberikan akses informasi yang cepat terhadap suatu usaha yang sedang dijalankannya kepada konsumen ?</p> <p>2. Apakah informasi yang diberikan oleh pelaku UKM mengenai suatu usaha mengandung unsur <i>community development</i> ?</p> <p>3. Apakah penguasaan terhadap teknologi menjadi point penting dalam perkembangan suatu UKM ?</p> <p>4. Apakah kurangnya kecakapan dalam berteknologi menjadi penghambat</p>	<p>Untuk akses informasi bisa ditanyakan secara langsung kepada karyawan yang sedang bertugas ditempat.</p> <p>Ya, salah satunya yaitu mengenai keterbukaan dalam akses informasi.</p> <p>Bisa jadi, karena dizaman sekarang penjualan tidak dilakukan melalui <i>offline</i> tapi juga melalui <i>online</i>.</p> <p>Belum tentu, tapi kemungkinan bisa terjadi, jika suasananya masih seperti sekarang ini, terjadinya pandemi covid-19.</p>

		<p>laju perkembangan dalam suatu Usaha ?</p> <p>5. Adakah solusi yang diberikan oleh pemilik UKM terhadap anggotanya dalam mengatasi kurangnya kecakapan dalam berteknologi ?</p> <p>6. Apakah solusi yang diberikan oleh pelaku UKM tersebut mengandung unsur <i>community development</i> ?</p> <p>7. Apakah dalam UKM ini, pemilik UKM sudah melakukan pembinaan yang mengandung unsur <i>community development</i> mengenai kecakapan berteknologi terhadap anggotanya ?</p>	<p>Tentunya selalu menyediakan solusi disetiap permasalahan yang dihadapi.</p> <p>Salah satunya yaitu pemahaman, pelatihan serta edukasi mengenai pentingnya teknoloig dimasa yang sekarang ini.</p> <p>Sudah pernah, yaitu mengenai keterbukaan kita sebagai anggota dari suatu usaha yang sedang dijalankan kepada konsumen mengenai akses informasi yang harus diberikan kepada konsumen.</p>
--	--	--	--

		8. Adakah sanksi yang diberikan kepada anggota UKM ketika mereka kurang cakap dalam menggunakan kemajuan teknologi ?	Sejauh ini belum ada, walaupun ada itu berupa Surat Peringatan (SP).
5.	Berkelanjutan	<p>1. Apakah dalam pengambilan suatu keputusan dalam pelaksanaan suatu usaha harus mempertimbangkan kepentingan dari peningkatan suatu kesejahteraan pelaku UKM dan anggotanya ?</p> <p>2. Apakah dalam pengambilan keputusan tersebut membahas tentang suatu inovasi yang akan dilakukan di masa sekarang ?</p> <p>3. Apakah inovasi menjadi salah satu point yang paling terpenting dalam kemajuan</p>	<p>Ya, Karen pertimbangan peningkatan kesejahteraan karyawan yang berkerja merupakan menjadi salah satu keberhasilan yang dicapai.</p> <p>Belum tentu, sebab kami selalu mengedepankan penyelesaian masalah dibandingkan membahas inovasi yang akan kami lakukan.</p> <p>Belum tentu, bisa saja tanpa melakukan inovasi suatu usaha tetap berdiri dengan kokoh. Asalkan produksi yang mereka</p>

		perkembangan UKM ?	lakukan selalu memberikan hasil yang memuaskan.
		4. Adakah inovasi yang dilakukan dalam UKM ini ?	Ada.
		5. Apakah terdapat hambatan yang dialami oleh pemilik UKM dalam melakukan inovasi suatu UKM ?	Kendala ada, tapi kami selalu memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi.
		6. Apakah dengan diterapkannya prinsip-prinsip <i>community development</i> memudahkan pelaku UKM dalam pelaksanaan UKM ?	Sangat membantu dalam pelaksanaan usaha.
		7. Adakah inovasi jangka panjang yang dibuat oleh pelaku UKM terhadap kemajuan suatu usahanya baik untuk masa kini maupun	Untuk inovasi yang dilakukan selanjutnya ada, tapi lebih banyak digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

		<p>untuk masa yang akan datang ?</p> <p>8. Apakah setelah diterapkannya prinsip-prinsip <i>community development</i> dalam suatu usaha memberikan perkembangan yang positif terhadap kemajuan suatu UKM ?</p> <p>9. Apakah terdapat kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip <i>community development</i> dalam kegiatan pelaksanaan UKM ?</p> <p>10. Apakah terdapat perbedaan dalam laju perkembangan UKM sebelum di terapkannya prinsip-prinsip <i>community development</i> dengan telah diterapkannya</p>	<p>Efek yang diberikan dari penerapan prinsip-prinsip ini sungguh baik, sangat positif dan cukup membantu dalam pencapaian suatu tujuan.</p> <p>Kendalanya ialah edukasi yang harus diberikan kepada karyawan mengenai pemahaman tentang prinsip-prinsip <i>community development</i>.</p> <p>Banyak perbedaan yang dirasakan dari sebelum menerapkan sampai sesudah melaksanakannya.</p>
--	--	--	---

		prinsip-prinsip <i>community</i> <i>development</i> ?	
--	--	---	--

(Sumber : Hasil Wawancara Pada Tanggal 14 Juli 2021)

C. Pembahasan

Analisis Prinsip-Prinsip *Community Development* Dalam Pelaksanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang

Berdasarkan identifikasi hasil wawancara dengan 16 Narasumber (Para Pelaku UKM di Kecamatan Seberang Ulu I) dalam penelitian ini, yaitu mengenai Analisis Prinsip-prinsip *Community Development* Dalam Pelaksanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *community development* dalam pelaksanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang sudah cukup terlaksana dengan **lancar hanya saja ada sebagian UKM yang belum melaksanakannya**, dari pihak pelaksana seperti Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sudah memberikan sosialisasi serta pelatihan mengenai *community development* terhadap pelaksanaan suatu Usaha terutama pada prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Akan tetapi dari pihak peserta seperti sebagian para pelaku UKM kurang meminati hal tersebut disebabkan karena rendahnya partisipasi sebagian pelaku UKM dalam menerapkan prinsip-prinsip *community development* dalam pelaksanaan Usaha yang mereka jalani, hal tersebut dapat terjadi karena sebagian pelaku UKM kurang memahami secara mendalam mengenai prinsip-prinsip *community development* tersebut jika diterapkan dalam pelaksanaan Usaha.

Sasaran utama dari penerapan prinsip-prinsip *community development* ini ialah para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Para pelaku usaha yang sudah menerapkan prinsip-prinsip tersebut mengalami banyak perubahan yang mereka dapatkan, mulai dari tujuan awal mereka yang lambat laun tercapai dengan baik, laju perkembangan UKM yang begitu efektif serta memberikan gambaran penyelesaian tentang permasalahan yang sedang terjadi dalam Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Analisis prinsip-prinsip *community development* ini dilakukan dengan mewawancarai secara langsung kepada karyawan bahkan pemilik UKM itu sendiri. Bagi mereka yang mengenal dan memahami prinsip-prinsip *community development* mereka senang dan merasa puas jika prinsip-prinsip itu diterapkan oleh para pelaku UKM lainnya dan tidak hanya sebagian UKM saja yang melaksanakannya tetapi yang lain pun ikut. Agar mereka dapat mengetahui manfaat serta dampak yang ditimbulkan setelah melaksanakannya. Tetapi kembali lagi, memang tidak mudah untuk menerapkannya, karena mengedukasi karyawan atau anggota UKM lainnya mengenai hal itu tidaklah mudah, banyak yang harus dikorbankan, seperti halnya waktu, tenaga dan pikiran agar mereka memahami dan bisa cepat menerapkannya dalam usaha mereka.

Banyak pemilik UKM yang sudah mengetahui dan memahami mengenai prinsip-prinsip *community development* tetapi mereka enggan untuk menerapkannya dalam usaha mereka, karena menurut mereka lebih baik menggunakan cara lama karena sudah terbukti hasilnya dibandingkan hal baru yang belum diketahui hasilnya.

Padahal dibalik kesuksesan dan kemajuan yang diperoleh oleh UKM lainnya ialah *support* dan bantuan dari prinsip-prinsip tersebut.

Teknologi dan inovasi juga menjadi *point* penting dalam penyelesaian masalah yang sedang terjadi dalam pelaksanaan UKM. Karena kebanyakan pelaku UKM masih menerapkan sistem lama, tidak ada inovasi yang mereka lakukan dalam usaha mereka, walaupun ada itu hanya sekedar inovasi biasa, melainkan bukan inovasi yang mereka buat untuk kemajuan suatu usaha yang sedang mereka jalani. Banyak jargon yang peneliti dengar ketika mewawancarai mereka yaitu “yang penting laris, yang lainnya nanti bisa dipikirkan lagi”. Padahal banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk memajukan usaha mereka salah satunya dengan kecakapan dalam berteknologi di era yang serba digital sekarang ini. Apalagi seperti masa sekarang ini ketika dunia sedang dilanda penyakit yang entah kapan akan berakhirnya harusnya teknologi menjadi salah satu faktor yang penting dalam mempertahankan usaha mereka di masa pandemi ini, salah satunya ialah penjualan secara *online*.

Terdapat lima prinsip-prinsip *community development* yang dikemukakan oleh Edi Suharto terhadap pelaksanaan Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Hasil dari wawancara kepada 16 narasumber pelaku UKM maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Partisipasi, ialah dimana para pelaku UKM ikut serta terlibat secara aktif dan langsung dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dalam kegiatan UKM yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang agar pelaku UKM mengetahui betapa pentingnya prinsip-prinsip *community development* diterapkan dalam pelaksanaan suatu Usaha.

Berdasarkan Hasil dari wawancara kepada 16 narasumber mengenai prinsip-prinsip *community development* terhadap pelaksanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang 60% dari mereka sudah melaksanakan prinsip partisipasi ini, akan tetapi masih ada 40% lagi pelaku UKM yang belum melaksanakan Prinsip Partisipasi yang ada dalam teori *community development* terhadap pelaksanaan UKM yang mereka jalani. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya minat mereka dalam menerapkan prinsip partisipasi ini dalam usaha mereka. karena menurut mereka yang belum melaksanakannya partisipasi hanya cukup ikut serta dalam sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) saja dan tidak untuk diterapkan di Usaha mereka.

2. Keadilan dan Kesetaraan Gender, ialah menempatkan sesuatu hal dengan sama dan sesuai dengan porsinya masing-masing. Dengan kata lain dalam pelaksanaan UKM prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam *community development* menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan diantara laki-laki dan perempuan semuanya memiliki hak dan kebebasan yang sama dan setara. Berdasarkan hasil dari wawancara kepada 16 narasumber pelaku UKM mengenai prinsip-prinsip *community development* dalam pelaksanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, yaitu hampir 75% dari mereka menerapkan keadilan dan kesetaraan gender dalam teori *community development* walaupun ada dari mereka yang belum menerapkan secara keseluruhan prinsip-prinsip *community*

development akan tetapi mereka melaksanakan keadilan dan kesetaraan gender bagi setiap pegawai yang ada, semuanya mempunyai hak dan kebebasan yang sama tidak ada perbedaan diantara laki-laki dan perempuan dalam hal pekerjaan semuanya mempunyai porsinya masing-masing. Hal tersebut mereka laksanakan guna untuk menyetarakan agar tidak ada tembok perbedaan diantara laki-laki dan perempuan.

3. Demokratis, ialah memberikan hak kebebasan kepada masing-masing individu untuk mengambil keputusan serta menyuarakan pendapatnya. Dengan kata lain dimana para pelaku UKM memberikan kebebasan kepada masing-masing anggotanya untuk mengemukakan pendapatnya. Berdasarkan hasil dari wawancara kepada 16 narasumber pelaku UKM mengenai prinsip-prinsip *community development* dalam pelaksanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, yaitu 65% dari pemilik UKM memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk menyuarakan pendapatnya, tidak mengenal golongan semua kritik, saran serta masukan boleh disuarakan oleh semua anggota dari pemilik UKM. Akan tetapi pemilik UKM tidak memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk mengambil keputusan terhadap usaha yang mereka jalankan, hanya pemilik UKM sajalah yang mempunyai kuasa akan hal itu. Padahal dalam penerapan prinsip Demokratis ini terdapat 2 point penting yaitu kebebasan berpendapat dan kebebasan pengambilan keputusan, tetapi hanya pengambilan keputusan saja yang tidak diberikan kuasa kepada para anggotanya, tetapi jika pengambilan keputusan dilakukan untuk diri kepentingan

diri mereka sendiri seperti halnya pengunduran diri itu diperbolehkan, diluar dari pengambilan keputusan yang berdampak pada UKM.

4. **Transparansi dan Akuntabilitas**, ialah dimana setiap pengelolaan kegiatan suatu usaha harus transparansi atau terbuka kepada para anggota serta hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan kata lain dimana dalam pelaksanaan suatu UKM pelaku UKM memberikan akses keterbukaan, akses informasi mengenai suatu Usaha kegiatan yang sedang di jalankan kepada konsumen, serta memberikan akses informasi yang mudah kepada para konsumen jika dibutuhkan. Berdasarkan hasil dari wawancara kepada 16 narasumber pelaku UKM mengenai prinsip-prinsip *community development* terhadap pelaksanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, yaitu baru 55% pelaku UKM yang melaksanakan prinsip keterbukaan ini, selain keterbukaan dalam kegiatan teknologi juga diperlukan dalam suatu usaha ini, karena kemajuan teknologi menjadi salah satu pendorong yang utama terhadap kemajuan suatu usaha. Keterbukaan mengenai suatu kegiatan serta akses informasi dapat diakses dengan mudah oleh konsumen melalui kecanggihan teknologi seperti website, sosial media dan jejaring sosial lainnya. Akan tetapi kenyataan dilapangannya hanya 55% saja pelaku UKM yang melaksanakannya sebagiannya belum melaksanakannya karena dianggap teknologi bukan menjadi alasan utama kemajuan dari usaha mereka, maka dari itulah pentingnya edukasi mengenai teknologi di era sekarang ini.

5. Berkelanjutan, ialah suatu proses yang dilakukan dengan berlanjut atau untuk jangka panjang dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan dimasa kini maupun dimasa yang akan datang. Dengan kata lain di mana para pelaku UKM harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan anggota UKM dan kemajuan UKM tidak hanya untuk saat ini tapi juga untuk di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil dari wawancara kepada 16 narasumber mengenai prinsip-prinsip *community development* terhadap pelaksanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, yaitu 65% pelaku UKM yang melaksanakan prinsip berkelanjutan ini terkait dengan suatu inovasi yang akan dibuat dan diterapkan kedepannya. Para pelaku UKM juga harus mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya jika suatu inovasi dilaksanakan. Inovasi dilakukan guna untuk memajukan suatu UKM. Pelaku UKM juga dapat merasakan dampak yang diberikan setelah menerapkan inovasi itu. selain itu 35% UKM lainnya yang belum melaksanakan prinsip berkelanjutan ini belum melaksanakan ataupun membuat rancangan dan rencana yang akan dilakukan kedepannya seperti inovasi, mereka belum mempertimbangkan hal itu, yang mereka pertimbangkan hanyalah kemajuan UKM mereka saja tanpa mengetahui bahwa inovasi sangat penting dilakukan dan juga dapat membantu laju perkembangan dan kemajuan suatu usaha yang sedang dijalankan. Menurut sebagian dari mereka inovasi hanya membuang waktu dan tenaga saja jika hasil yang didapat tidak sesuai harapan lebih baik tetap mempertahankan cara lama

yang sudah terbukti hasilnya. Maka dari itu edukasi tentang inovasi diperlukan di zaman seperti sekarang ini.

Dari lima prinsip-prinsip *community development* teori Edi Suharto, masing-masing dari variabel itu memiliki nilai dan manfaatnya masing-masing dalam pelaksanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Karena lima variabel dalam prinsip-prinsip *community development* tersebut dapat membantu dalam pelaksanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang agar suatu Usaha yang dijalankan dapat berjalan secara lancar dan efektif, serta dapat membantu para pemilik UKM dalam mencapai tujuannya.